

**PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITA PELAYANAN UMUM
DIKELURAHAN MAHARATU KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



DARMANSYAH PUTRA GEA
137310496

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

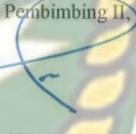
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	Darmansyah Putra Gea
NPM	: 137310496
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, Maret 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
	
Dr. H. Syafhendry, M.Si	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua,



Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Darmansyah Putra Gea
 NPM : 137310496
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

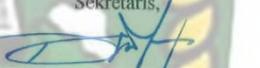
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya unruk memenuhi salah satu syarat guna memeperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 11 April 2019

An. Tim Penguji
 Sekretaris,

Ketua,

 Dr. Zainal, Ssos., M.Si


 Data Wardana, S.Sos., M.IP
 Anggota


 Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si
 Anggota

Mengetahui,
 Wakil Dekan I


 Yendri Nazir, S.Sos., M.Si


 H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.S

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Damansyah Putra Gea
NPM : 137310496
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 11 April 2019

Ketua,


Dr. Zainal, S.sos., M.Si

Sekretaris,


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.S

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.S

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 337/UJR-Fs/Kpts/2019 tanggal 02 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 04 April 2019 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Darmansyah Putra Gea
 NPM : 137310496
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Mahratu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : "76,20" ; Huruf : " B_r "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 04 April 2019
 An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 337/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Dermansyah Putra Gea**
 N P M : 137310496
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Lota Pekanbaru.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Data Wardana.,S.Sos.,M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. H. Syafhendry.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 02 April 2019
 An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini sesuai dengan judul “Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum” walaupun terasa sulit tetapi begitu indah.

Pada proposal ini penulis mencoba menyusun dengan sebaik mungkin sehingga mudah untuk dipahami, namun jika terdapat kekurangan dalam proposal ini baik cara penulisan, tata bahasa, maupun materi yang terdapat di dalamnya, penulis dengan lapang dada untuk dikritik maupun diberi saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini kedepannya, sehingga hasil proposal ini dapat dijadikan rujukan serta menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat dan Lurah sendiri yang tinggal di kelurahan agar pemeliharaan fasilitas umum yang telah disediakan.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Melalui kata pengantar ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga proposal ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan.

3. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
4. Bapak Yendri Nazir, S.sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen/Asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
6. Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua yang terkasih Ayahanda Anwar Gea dan ibunda Maniati Zalukhu, serta adik-adik tercinta Wir Asnitha Gea, Ade Erna Sari Gea, Stefany Gea Carenphus Gea.
7. Terimakasih kepada sepupu saya Agung Perwira, Siti Rohani Zega, Agus Wanto Gea, Nota Gea, Jernika Gea atas doa dan dukungannya kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Hayati Halawa atas doa dan dukungannya kepada penulis.
9. Teman-teman organisasi extra kampus Persatuan Mahasiswa Nias (PEMANIS) yang berkuliah di Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan dukungan doa kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan kelas IP D angkatan 2013 yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang mereka berikan dapat menjadi manfaat dan berguna serta dibalas kebbaikannya oleh Tuhan yang Maha kuasa, amin...

Akhir kata, jika dalam penulisan penelitian ini masih di temukan kekurangan dan kesalahan, penulis berharap masukan, saran dan kritikan yang membangun guna memberikan penyempurnaan hasil dari penelitian ini sehingga dapat bermanfaat. Terimakasih....

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis,

Darmansyah Putra Gea



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	v
SK. TIM PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DATAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Kegiatan.....	14
2. Kegunaan Kegiatan.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	
A. Studi Kepustakaan.....	16
B. Kerangka Pikiran.....	30
C. Konsep Operasional.....	31
D. Operasional Variabel.....	34
E. Teknik Pengukuran.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Teknik Penarikan Sampel.....	39
E. Jenis dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisa Data	41
H. Jadwal dan Waktu Penelitian.....	41
I. Rancangan Sistematis Penelitian	42

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis	44
B. Keadaan Penduduk	45
1. Jumlah Penduduk.....	45
2. Matapencaharian.....	46
3. Agama dan Kepercayaan	47
4. Tingkat Pendidikan.....	48
C. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan	49
D. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan.....	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	55
B. Hasil Penelitian	58
C. Hambatan-Hambatan dari Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	65

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN 67
DOKUMENTASI..... 69



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

I.1.	Daftar Prasarana dan Fasilitas Umum di Kelurahan Maharatu Beserta Kondisinya	12
II.2.	Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	34
III.1.	Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	39
III.2.	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru	42
IV.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Maharatu	45
IV.2.	Jenis Dan Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Di Kelurahan Maharatu	45
IV.3.	Jumlah Penduduk Menurut Agama	46
IV.4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Maharatu	47
V.1.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Maharatu	56

V.2.	Identitas Responden Tentang Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin	57
V.3.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia Kelurahan Maharatu ...	58
V.4.	Tanggapan Responden Pemerintah Kelurahan dan Perangkat RT/RW Mengenai Indikator Pemeliharaan Rutin.....	59
V.5.	Tanggapan Responden Pemerintah Kelurahan dan Perangkat RT,RW Mengenai Indikator Pemeliharaan Berkala.....	60
V.6.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	64



DAFTAR GAMBAR

II.1. Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	30
IV.1. Struktur Organisasi Kelurahan Maharatu	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Daftar Kuesioner Untuk Kelurahan Maharatu dan Perangkat RT/RW
Kelurahan Maharatu..... 70
2. Dokumentasi Hasil Penelitian..... 75
3. SK Dekan Fisipol Universitas Universitas Islam Riau 81
4. Surat Rekomendasi dari Badan Perizinan Terpadu..... 82
5. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru 83
6. Surat Keterangan Pengantar Riset dari Kecamatan Marpoyan Damai..... 84
7. Surat Keterangan Riset dari Kelurahan Maharatu 85
8. Daftar Telly Jawaban Responden Penelitian Pemerintah Kelurahan dan Perangkat RT/RW Kelurahan Maharatu 86

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmansyah Putra Gea

NPM : 137310496

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas ;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2019

Pelaku pernyataan



Darmansyah Putra Gea

**PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DI KELURAHAN
MAHARATU KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Darmansyah Putra Gea

Kata kunci : Pelaksanaan, Pemeliharaan Prasarana, Fasilitas Pelayanan Umum

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif dibawah Kecamatan dalam konteks Otonomi Daerah, Kelurahan merupakan kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan Desa kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas dalam perkembangannya sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (i) faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dikelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru. (ii) Bagaimana cara mengatasi masalah sarana dan prasarana yang ada dikelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan ini yaitu tipe survey deskriptif, dan teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara random sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, angket dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode survey deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan rutin didapatkan mencapai kategori cukup berhasil yang didapat dari hasil kuesioner sedangkan pemeliharaan berkala hanya mencapai kategori kurang berhasil dari hasil kuesioner, maka diketahui bahwa pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kelurahan maharatu kota pekanbaru didapatkan hasil dalam kategori kurang berhasil karena dapat dilihat dari setiap pelaksana indikator mengenai pemeliharaan di wilayah kelurahan maharatu tidak berjalan dengan baik, tetapi ada juga berhasil dengan maksimal seperti pelayanan yang tergolong cukup memuaskan.

**IMPLEMENTATION OF STRAIGHT TASK IN INFRASTRUCTURE
MAINTENANCE AND PUBLIC SERVICE FACILITIES IN KELURAHAN
MAHARATU KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

ABSTRACT

Darmansyah Putra Gea

Keywords: Implementation, Maintenance Of Infrastructure, Public Service Facilities

Kelurahan is the division of administrative areas under the Subdistrict in the context of Regional Autonomy, the Kelurahan is the work of the Lurah as a District or City Equipment which has the status of a Civil Servant, the kelurahan is the smallest unit of the village level. In contrast to the Village Village having the right to regulate its territory more limited in its development a village can be changed to a village. The purpose of this study is to find out (i) what factors influence the implementation of the lurah's duties in maintaining public service facilities and infrastructure in Maharatu sub-district Marpoyan Damai, Pekanbaru. (ii) How to overcome the problem of existing facilities and infrastructure in Maharatu sub-district, Marpoyan Damai, Pekanbaru. The research method used is the type of descriptive survey, and the sampling technique is by random sampling. Techniques for collecting data through observation, questionnaires and documentation. Data were analyzed by descriptive survey method. The results showed that routine maintenance was found to reach a fairly successful category obtained from the results of the questionnaire while periodic maintenance only reached a less successful category from the results of the questionnaire. Pekanbaru City obtained results in a less successful category because it can be seen from every implementer of indicators regarding maintenance in the area of the Maharatu Urban Village that did not work well, but there also succeeded with a maximum such service that was quite satisfactory.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 2 pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari pernyataan UU ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dengan menciptakan Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing dengan kemajuan era globalisasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban, selain itu daerah diharapkan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Disini Pemerintahan memasuki zaman baru dalam menjalankan pemerintahan daerah hal ini dapat kita lihat adanya perubahan dari UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah digantikan dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah, perubahan dapat dilihat dari perbedaan Yuridis tertuang dalam bentuk pasal pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam pasal sebelumnya. Adapun urusan pemerintahan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertera

pada pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa pemerintah pusat selanjutnya dikatakan sebagai pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggara pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ini berdasarkan Asas Otonomi.

Otonom adalah suatu hak atau wewenang, kewajiban yang diberikan pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah untuk menjalankan, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi keperluan masyarakat di daerah yang telah diatur didalam perundang-undangan. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Autos* dan *Namos*, *autos* berarti sendiri dan *namos* aturan atau Undang-Undang sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan mengurus rumah tangga sendiri sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada Hakikatnya daerah yang berotonom adalah upaya yang dibentuk guna memperbaiki kesejahteraan dengan mewujudkan masyarakat yang bisa membuat sebuah perubahan-pembaharuan yang sesuai dengan kehendak dan keperluan masyarakat.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan dalam konteks Otonomi Daerah, Kelurahan merupakan kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.

Berbeda dengan Desa kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas dalam perkembangannya sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kelurahan berdasarkan kedudukannya dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun kelurahan merupakan perangkat kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Kelurahan diatur dan dibentuk dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman pada peraturan Pemerintah, dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 ayat (2) Lurah Merupakan pemimpin Kelurahan dan sebagai Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.

Selanjutnya di ayat ke (3) Pengangkatan Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan usulan SEKDA atau Sekretaris Daerah diambil dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat menurut peraturan Perundang-Undangan. Dan di dalam pasal 229 Undang-undang No.23 tahun 2014 ayat (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan Masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan hal ini merupakan dasar menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administratif, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri sehingga setiap masyarakat yang ada pada lingkungan kelurahan berhak untuk menyatakan pendapat seperti keinginan sendiri.

Kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2018 pasal 3 ayat ke (2) berbunyi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Selanjutnya di pasal 4 ayat 1 lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 25 (3) peraturan pemerintah No.17 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas pokok , lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat :dan

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan diatas dapat dilihat salah satu tugas kelurahan pemeliharaan prasarana dan pelayan umum yang dimana Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum adalah salah satu bahan penelitian. Kelurahan siap melihat semua kebutuhan masyarakat agar terciptanya pemerintah kelurahan yang berjalan sesuai koridor kelurahan itu sendiri yang tertera di dalam perundang-undangan, kelurahan juga harus dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mewujudkan program-program pembangun terstruktur hasil yang efektifas dan efesiensi.

Pemeliharaan adalah suatu perpaduan dari segala langkah yang dilakukan untuk menjaga suatu perlengkapan dan memperbaikinya sampai suatu keadaan yang bisa diterima. Pemeliharaan pemeliharaan atau memelihara merupakan segala sesuatu cara untuk menjaga dan merawat atau memperbaiki segala sesuatu yang dianggap penting, berharga dan berguna.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan atau proyek. Prasarana segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Ali, 1996:796).

Sarana: Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Prasarana: Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb), (Kamus Besar BI, 2002:893). Sarana : Segala sesuatu (bisa berupa

syarat atau upaya) yang sapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan (Kamus Besar BI, 2002:999).

Fasilitas pelayanan umum adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kepentingan umum, contoh dari fasilitas umum ialah jalan, saluran air, saluran air, angkutan umum flyover, halte, under pass, alat penerangan umum, banjir kana, trotoar, jalur bus way, drainase, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Fasilitas umum adalah milik bersama yang harus dipelihara baik agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka waktu yang panjang.

Fasilitas umum pada dasarnya adalah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Adapun manfaat dari fasilitas umum yaitu :

1. Fasilitas kesehatan : Dapat memperoleh kesehatan yang memadai,
2. Fasilitas komunikasi : Dapat berkomunikasi dengan baik,
3. Fasilitas jalan : Dapat menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan untuk membantu kelancaran seluruh kegiatan masyarakat.
4. Masyarakat merasa lebih nyaman karena kebutuhannya terpenuhi.

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Infrastruktur dapat ditemukan dan di kemukakan banyak orang di dalam percakapan sehari-hari, munculnya kata infrastruktur ini apabila ada pembahasan tentang fasilitas umum yang dimana fasilitas umum milik Pemerintah maupun milik perorangan dan swasta seperti Jalan Raya, Bandara, dan Fasilitas Lainnya. Meskipun sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi sudah tahukah apa arti kata infrastruktur yang sebenarnya.

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2003:32), bahwa “sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat”.

1. Jenis-jenis Infrastruktur

a. Infrastruktur Keras (*Physical Hard Infrastructure*)

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata istilah infrastruktur sering kali kita gunakan dalam istilah infrastruktur sering kali kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata infrastruktur biasanya muncul ketika kita sedang membahas berbagai macam fasilitas umum baik milik pemerintah maupun milik perorangan seperti jalan raya, bandara, kendaraan umum, dan berbagai macam fasilitas umum lainnya.

b. Infrastruktur Publik

Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh Pemerintahan dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Beberapa contoh

infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan raya, bandara, stasiun, gorong-gorong, kantor polisi, dan berbagai macam infrastruktur publik lainnya.

c. Infrastruktur Keras Non Fisik

Infrastruktur keras non fisik adalah infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata atau jelas akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika digabungkan ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi, dan lain – lain.

d. Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*)

Pengertian infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya dibangun dengan melihat dan memperhatikan berbagai macam-macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan

oleh pemerintah. Beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan pembuatan surat izin mengemudi, pelayanan kantor kecamatan/kelurahan dan berbagai infrastruktur lainnya.

Pasal 34 ayat 3 Undang -Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu fasilitas pelayanan umum yang layak itu adalah jalan.

Peraturan pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang jalan pasal 1 ayat (3) berbunyi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 25 jalan umum menurut statusnya di kelompokkan atas

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2006 pasal 57 ayat (1) Wewenang Penyelenggaraan Jalan pada pemerintah dan Pemerintah Daerah, ayat (3) mengatakan wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Pasal 58 ayat (3) penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana di tunjuk dalam pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 97 ayat (1) peraturan pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan penyelenggaraan jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya, kemudian pada ayat yang ke (3) pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.

Kelurahan mempunyai tugas pokok untuk membantu kecamatan dalam memelihara sarana dan prasarana, jelas dalam hal ini koordinasi sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan tugas pokok kelurahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.

Lurah sebagai fasilitator merupakan cara memfasilitasi kelurahan melalui koordinasi dengan instansi terkait maupun kelembagaan yang berada di kelurahan maharatu, dikarenakan Lurah yang mempunyai terbatas dan sebagai perangkat kecamatan dan bukan wilayah administratif seperti desa.

Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebuah Kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 29,74km², kecamatan marpoyan damai secara geografis mempunyai batas-batas dapat dilihat seperti berikut :

- a. Dibelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Sukajadi.

- b. Dibelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tampan.
- c. Dibelah barat berbatasan dengan kecamatan tanpan dan Kecamatan Payung Sekaki.
- d. Dibelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Sail.

Kecamatan Marpoyan Damai mempunyai enam Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Maharatu
2. Kelurahan Sidomulyo Timur
3. Kelurahan Wonorejo
4. Kelurahan Tangkerang Barat
5. Kelurahan Tangkerang Tengah
6. Kelurahan Perhentian Marpoyan

Kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan pemekaran dari Kelurahan induk yakni Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya dan kelurahan Sidomulyo Timur kecamatan Tampan, berdasarkan peraturan daerah No.4 tahun 2016 tentang pemekaran kelurahan di Pekanbaru. Kantor lurah Maharatu diresmikan pada tanggal 23 desember 2004 dan merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Marpoyan Damai dengan luas wilayah 1.698,214 m² dan bertopografi daratan berbatasan dengan beberapa kelurahan, yaitu;

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Perhentian Marpoyan.

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga.

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo Timur.

Tabel I.1. Daftar Prasarana dan Fasilitas Umum dikelurahan Maharatu Beserta Kondisinya

No	Lokasi Kelurahan			Prasarana dan Fasilitas Umum	Volume	Kondisinya (yang Perlu diperlihatkan)
	RT	RW	Jalan			
1	2	3	4	5	6	7
1.			Jl. Perhubungan	Jalan		- Perlu pembuatan drainase
2.			Jl. Pahlawan kerja	Posyandu		- Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> • Timbangan • Meter pengukur
3.	01	02 03		SDN 193 Pekanbaru	P:50, L : 40 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Meubel • Box couver (<i>pembuata n turap</i>) - Perlu daidakan pembangunan pagar sekolah - Pemasangan paving blok lapangan sekolah
4.		09	Jl. Adisucipto		300 m	Jalan perlu di aspal
5.		09		SMAN 4 Pekanbaru		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perbaikan jalan

						menuju SMAN 4 <ul style="list-style-type: none"> • Perlu perbaikan sekitar parit sekolah
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Kantor Kelurahan Maharatu

Dalam data yang dapat diperoleh penulis dapat menyajikan sejumlah fenomena-fenomena yang terdapat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru :

1. Terindikasi kurangnya koordinasi antara kelurahan kecamatan dan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jalan yang berlubang, ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan yang berkendara.
2. Terindikasi kelurahan tidak memfasilitasi atau membuat saluran tempat air mengalir (drainase) sehingga terdapat beberapa ruas jalan yang tergenang air ketika curah hujan yang panjang, hal ini dapat menyebabkan kerusakan jalan.

Berdasarkan dari fenomena di atas untuk lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan tugas lurah dalam memelihara fasilitas dan pelayanan umum oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana hasil pelaksanaan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dikelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru?
2. Bagaiman cara mengatasi masalah sarana dan prasarana yang ada dikelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil dan menjelaskan sejauh mana pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menghambat dari pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai pelaksanaan tugas lurah dalam bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.
- b. Sumbang pikir bagi mahasiswa dan masasiswi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya di prodi khususnya ilmu pemerintahan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis menyusun dan merangkaikan beberapa definisi menurut pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Teori Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:7): Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2011:23): Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan

daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Pemerintah adalah orang-orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban untuk memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan dengan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang bersangkutan mendapatkannya saat dibutuhkan sesuai dengan tuntutan yang diperintah (Ndraha, 2003;6).

Menurut Ndraha (2011:5), “pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan pelayanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai suatu sovereign, sebagai pelanggan, konsumen, yang tidak berdaya, dan sebagainya”.

Kemudian yang disebut pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia wajib melayankannya (Ndraha, 2003;7). Lebih lanjut yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan

pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha,2003;7).

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi beberapa daerah seperti yang tertera pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah sehingga masalah-masalah pemerintahan tidak hanya terbebani oleh pemerintah pusat saja.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang no.23 tahun 2014). Pemerintah daerah dibentuk untuk membantu Pemerintah pusat dalam mengatur daerah-daerah. Dan pemerintah daerah dibentuk juga untuk mengatur segala yang ada di daerah itu (Otonomi daerah).

2. Konsep/Teori Pelaksanaan

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui.

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian Riant Nugroho (2004:163)

Dengan adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. (Anonym, 2018).

Westa (1985 : 17) Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pendapat Claves yang dikutip (*dalam* Wahab 2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah dan administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Selanjutnya menurut (Mazmanian dan Sebastiar *dalam* Wahab, 2008) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan efektif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Kemudian menurut (*Van Meter dan Van Hom dalam* Wahab, 2008:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Menurut (Friedrich *dalam* Wahab 2008:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (*dalam* Nurdin dan Usman, 2003:7) menggunakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

3. Teori Tugas

Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), *“The term task is frequently used to describe one portion or element in a job”* (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa *“A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose”* (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), *“Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”*.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

4. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah Indonesia, kelurahan merupakan

wilayah tempat bekerja lurah sebagai perangkat Kecamatan, yang memimpin kelurahan merupakan seorang Aparatur Sipil Negri.

Menurut aturan yang terdapat di peraturan kecamatan no 17 tahun 2018 menjelaskan bahwa kelurahan adalah wlayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan, sedangkan lurah adalah kepala kelurahan yang berada dibawah dan berada dan bertanggung jawab kepada camat.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas lurah adalah segala tindakan, kegiatan segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh lurah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintah di wilayah kelurahan. Adapun tugas pokok lurah terdapat di dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2008 tentang kecamatan.

Selanjutnya dalam pasal 25 ayat 3 peraturan pemerintah No.17 tahun 2008 tentang pokok Lurah adalah :

- a. Pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kansil, (2003:190) mendefenisikan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha

aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sutupo, (2001:10) kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan publik bertujuan memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Menurut Nugroho, (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau kelompok. Kebijakan (*policy*) dalam pemerintah hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga dikatakan atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang, actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah actor dalam bidang kegiatan tertentu. (Inu Kencana,1998;105)

Dunn, (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

5. Teori Pemeliharaan

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa Yunani, artinya merawat, menjaga dan memelihara. Menurut Jr. Patton (1995, P. 23) pengertian maintenance secara umum yaitu serangkaian aktivitas (baik bersifat teknis dan administrative) yang diperlukan mempertahankan dan menjaga suatu produk atau sistem tetap berada pada dalam kondisi aman, ekonomis, efisien dan pengoperasian optimal. Aktivitas perawatan sangat diperlukan karena :

- Setiap peralatan punya umur penggunaan (useful life). Suatu saat dapat mengalami kegagalan dan kerusakan.
- Kita dapat mengetahui dengan tepat kapan peralatan akan mengalami kerusakan. Manusia selalu berusaha untuk meningkatkan umur penggunaan dengan melakukan perawatan.

Menurut Patrick (2001, p.407), pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaikinya, melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi agar sesuai perencanaan yang ada.

Menurut Jay Heizer dan Barry Render, (2001:45) dalam bukunya “*operations Management*” pemeliharaan adalah : “*all activities involved in keeping a system's equipment in working order*”. Artinya: pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik. Kemudian menurut Harsanto (2013:107), Pemeliharaan

adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai.

Menurut hardiyatmo dalam bukunya yang berjudul Pemeliharaan Jalan Raya (20015:2012) mengatakan bahwa pemeliharaan dapat dilihat dari cara dan waktu perbaikan. Pemeliharaan *preventif* adalah aplikasi penanganan sebelum terjadinya kerusakan, yang bertujuan untuk memperpanjang umur perkerasan, biasanya terencana. Jadi, pemeliharaan *preventif* bertujuan untuk mencegah atau mereduksi kemungkinan kerusakan akan berlanjut. Perawatan permukaan, mengisi atau menutup retak, dianggap sebagai pemeliharaan *preventif*.

Pemeliharaan *korektif* atau pemeliharaan struktural adalah pekerjaan perbaikan setelah perkerasan rusak/ Jadi, pemeliharaan korektif bersifat perbaikan struktural, yaitu bertujuan agar integritas struktur perkerasan bertambah. Hal ini, contohnya peralatan untuk mengisi alur yang dilanjutkan dengan pemberian lapisan tambahan (*overlay*) dan pembangunan kembali perkerasan (*reconstruction*). Pemeliharaan korektif biasanya lebih mahal dibandingkan dengan pemeliharaan *preventif*.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki fasilitas prasarana yang ada agar dapat efektif dan efisien sesuai dengan yang telah direncanakan. Kurang diperhatikannya Pemeliharaan diantaranya disebabkan oleh banyaknya dana yang dibutuhkan, dan rumitnya tugas Pemeliharaan, namun

kegiatan pemeliharaan dibagi menjadi dua fungsi, yaitu pelaksanaan dan kesadaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap prasarana dan fasilitas umum.

Sedangkan menurut Hardiyatmo (2015:209) pemeliharaan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan yang meliputi:

- a. Pemeliharaan Rutin
- b. Pemeliharaan Berkala

6. Konsep Prasarana

Prasarana: Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb), (Kamus Besar BI, 2002:893).

Sarana: Segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang sapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan (Kamus Besar BI, 2002:999).

7. Konsep Fasilitas Umum

Fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan perkara (kelancaran tugas dan sebagainya) atau kemudahan. Sedangkan menurut Subroto dalam Arianto Sam (2012:45), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang.

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan

sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

Menurut Mankiw (2003:38) infrastruktur merupakan wujud dari publik kapital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan.

Menurut Grigg *dalam* Kodoatie(2003:32), bahwa “sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

8. Konsep/Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut Hasibuan, (Torang, 2013: 165) adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Stoner dan freeman Manajement adalah proses perencanaan, pergorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, supaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi yang telah ditetapkan (*dalam*, Sunyoto 2012:3)

Menurut Prajudi, Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada sector serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan

untuk mencapai atau menyelesaikan suatu parpta atau tujuan kerja tertentu (dalam, Ndraha,2007;268).

9. Teori Organisasi

Menurut pendapat Moekijat (2005;6) organisasi adalah kerangka didalam mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disantunkan.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang manpu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

10. Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasisiono (2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah

atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Moenir (2003:82) terdapat beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting, yaitu:

- a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau tindakan yang berikutnya.
- b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.
- c. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang menggambarkan hierarki pertanggung jawaban, pembagian kerja, yang berdasarkan keahlian dan berfungsi masing-masing bagian sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan seta pengembangan organisasi.
- d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat mengairahkan semangat kerja yang tinggi.
- e. Faktor kemampuan dan keterampilan kerja dapat ditingkan dengan pemberian bimbingan dan petunjuk kerja mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus pegawai.

Pelayanan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila adanya kerja sama antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani guna dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adapun pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai kegiatan seorang, sekelompok orang dan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi suatu kebutuhan,(Pasalong 2008:128).

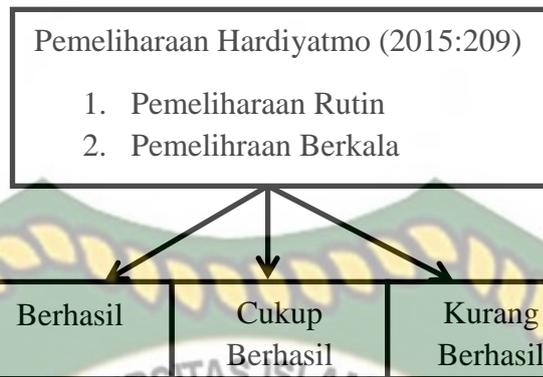
Selanjutnya menurut Wasistiono , (2003:41) bahwa memberi pelayanan kepada masyarakat adalah tugas pokok pemerintah yang penting. Oleh sebab itu, lembaga pemerintah sering juga disebut dengan pelayanan masyarakat (*public servant*).

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan meneliti masalah yang dihadapi serta mekanisme hubungan lembaga dengan indikator – indikator penentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran dari penelitian dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut.

Gambar II.1. Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru





Sumber : modifikasi penulis, tahun 20018

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran preposisi atas istilah yang digunakan maka diberikan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pemerintah merupakan suatu organisasi atau badan yang berfungsi untuk memenuhi, melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
2. Pemerintah adalah keadaan untuk memproses pemenuhan, perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
4. Pelaksanaan tugas lurah yang dimaksudkan disini ialah untuk melihat kinerja kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh kelurahan maharatu dan juga digunakan untuk menilai sejauh mana efektifan kebijakan publik serta sejauh mana tujuan yang telah dicapai

5. Tugas merupakan kewajiban yang harus di kerjakan oleh seseorang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas adalah suatu pekerjaan yg wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya. Dalam hal ini pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dikelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru.
6. Tugas Lurah Sebagai mana dalam Pasal 25 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu:
 - Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan,
 - Pemberdayaan masyarakat,
 - Pelayanan masyarakat,
 - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,
 - Dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
7. Kelurahan dalam penelitian ini merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Prasarana dan fasilitas umum merupakan infrasruktur yang mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan bermasyarakat
9. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum adalah serangkaian tugas lurah dalam membantu tugas kecamatan, dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang ada di kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kotaPekanbaru.

10. Pemeliharaan adalah usaha yang bertujuan menjaga, merawat serta melestarikan sesuatu yang sudah ada.

11. Pemeliharaan dalam penelitian sebagai suatu proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kerjasama, koordinasi, evaluasi atas berbagai kemungkinan, atas apa saja yang terjadi.

12. Pemeliharaan dalam penelitian ini menurut Hardiyatmo (2015 : 209)

Pemeliharaan bisa dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu :

- a. Pemeliharaan Rutin
- b. Pemeliharaan Berkala.

a. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin mencakup pekerjaan-pekerjaan perbaikan kecil dan pekerjaan-pekerjaan rutin, yang umum dilaksanakan pada jangka waktu yang teratur dalam satu tahun.

Adapun indikator indikatornya adalah :

- melakukan pengecekan prasarana dan fasilitas umum
- Melaksanakan perbaikan prasarana dan fasilitas umum
- Mengavaluasi hasil pemeliharaan sarana dan fasilitas umum

b. Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan berkala merupakan pekerjaan yang mempunyai frekuensi yang terencana lebih dari satu tahun pada salah satu lokasi.

Adapun indikatornya adalah :

- Membuat jadwal pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengavaluasi hasil pemeliharaan sarana dan fasilitas umum.

D. Operasional Variabel

Adapun Operasional Variabel mengenai Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Tabel II.2. Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-leading-controlling Riant nugroho	Tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	1.pemeliharaan rutin	1.melakukan pengecekan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 2.Memperbaiki prasaranan dan fasilitas pelayanan umum 3.melakukan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Berhasil Cukup berhasil Kurang berhasil
		2.pemeliharaan berkala	1.Membuat jadwal pemeliharaan prasaranadan fasilitas	Berhasil Cukup berhasil Kurang berhasil

			pelayanan umum 2.pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 3.evaluasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum	
--	--	--	---	--

Sumber :modifikasi penulis,2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variable atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah : baik, cukup baik, kurang baik.

Untuk melihat hasil pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum maka dibuatkan pengukuran variable sebagai berikut :

Berhasil : Apabila semua indikator pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di kelurahan Maharatu kota Pekanbaru, telah menjalankan yang ada atau jawaban responden pada kategori 71%-100%.

Cukup berhasil : Apabila penilaian indikator pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di kelurahan

Maharatu kota Pekanbaru, telah menjalankan dua hingga tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori cukup baik 34%-70%

Kurang berhasil : Apabila penilaian indikator pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di kelurahan Maharatu kota Pekanbaru, hanya menjalankan satu indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori cukup baik 0%-33%.

Selanjutnya pengukuran yang diberikan masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan rutin

Berhasil : Apabila semua item mendapat tanggapan respon baik dengan persentase 71-100%

Cukup berhasil: Apabila tanggapanresponden terhadap item penilaian cukup baik dengan presentase 34-70%.

Kurang berhasil: Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak baik dengan presentase 1-33%.

2. Pemeliharaan berkala

Berhasil: Apabila semua item mendapat tanggapan respon baik dengan presentase 71-100%.

Cukup berhasil: Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup baik dengan presentase 34-70%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan yang benar-benar tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan sesuai pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan beberapa data, mngklarifikasikan dan menganalisa sehingga dapat diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahannya yang dihadapi. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun alasan mengapa dipilahnya lokasi penelitian ini merupakan pertimbangan karena kantor Lurah merupakan perangkat Kecamatan yang cukup penting dan berperan dalam pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum terlihat banyak permasalahan-permasalahan dilapangan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah dua bentuk yang berbeda namum didalam hal ini yang membedakannya adalah menurut Usaman dan Akbar (2011:42) menyatakan: populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Sendangkan sampel adalah sebagai anggota populasi yang diambil menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar 2011:43), yang menjadi sampel penelitian ini adalah pemerintahan kelurahan dan peangkat RT/RW dikarenakan kegiatan pemeliharaann ini tidak terlepas dari kelembagaan kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah Populasi dan Sampel pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Lurah	1	1	100%
2.	Sekretaris Lurah	1	1	100%
3.	Kasi Kelurahan	3	1	33,%
4.	Kasi Pembangunan jalan dan Jembatan	1	1	100%
5.	Ketua RT	39	7	18%
6.	Ketua RW	10	5	50%
Jumlah		58	16	

Sumber : Data olahan 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling yang mana teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu. Lurah, sekretaris Lurah, Kasi Pembangunan dan beberapa kelembagaan dari RT/RW. Peneliti mengambil dan membatasisi sampel sehingga dapat mewakili keseluruhan populasi dan mengetahui permasalahan penelitian.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisisioner, observasi dan dokumentasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru
2. Data sekunder, adalah peraturan-peraturan yang telah tersedia, diperoleh dengan membaca laporan-laporan, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang telah ada pada kantor kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian, untuk mendapatkan informasi mengenai Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum Dikelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru, dan adapun data yang didapat ialah ada beberapa Prasarana yang membutuhkan perhatian khusus dari pihak Kelurahan Maharatu.

2. Angket/Kuesioner

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh pemberi tanggapan atau responden yang

diharapkan bisa memberikan informasi dan jawaban sehubungan dengan masalah prasarana dan fasilitas di Kelurahan Maharatu tata cara pemberian kuesioner terhadap responden dengan menggunakan random sampling atau mengngambil beberapa responden dan membatasinya.

3. Dokumentasi

merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan dokumen dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang diambil merupakan jalan yang rusak khususnya jalan yang berada di kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian dokumentasi Kantor Kelurahan Maharatu.

G. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan di analisa dengan menggunakan analisis kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk table dan selanjutnya diambil kesimpulan.

H. Jadwal dan Waktu Penelitian

Adapun jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

Table III .2. Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaanprasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019																				
		Oktober				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penyusunan UP																					
2.	Seminar UP																					
3.	Revisi UP																					
4.	Penelitian																					
5.	Analisis Data																					
6.	Bimbingan Skripsi																					
7.	Ujian Skripsi																					
8.	Revisi dan Pengesahan																					
9.	Penyerahan Skripsi																					

I. Rancangan Sistematis Penelitian

Adapun sistem matika penulisan skripsi ini dibahas dalam 6 bab,dimana pembahasan-pembahasan bab tersebut memiliki kaitan antara satu dengan yang lain yaitu:

BABI: Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BABII: Studi Kepustakaan dan Kerangka pikir yang meliputi studi kepustakaan,kerangkapiker, konsep Operasional, Operasional Variable, dan Teknik Pengukuran.

- Bab III:** Metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan jadwal kegiatan penelitian.
- BAB IV:** Deskripsi lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial, keadaan pemerintahan.
- BAB V:** Hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan perasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
- BAB VI:** Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM

Kelurahan Maharatu sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat merupakan perangkat kecamatan marpoyan damai, berperan mengaktualisasi aspirasi masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan pemekaran dari kelurahan induk yaitu sebagian dari Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, berdasarkan peraturan daerah no. 3 tahun 2003 dan no.4 tahun 2004.

Pada tahun 2016 berdasarkan peraturan daerah no. 4 tahun 2016 Kelurahan Maharatu terbagi 2 menjadi Kelurahan Maharatu dan Kelurahan Perhentian Marpoyan, kantor lurah Maharatu diresmikan pada tanggal 23 desember 2004 dan merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

A. Keadaan Geografis

Kelurahan Maharatu adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kelurahan Maharatu yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai memiliki luas wilayah 2.330 km² yang memiliki

jumlah lembaga Rukun Tetangga (RT) berjumlah 39 dan Rukun Tentangga (RW) berjumlah 10, dengan jumlah penduduk laki-laki 5167 orang, perempuan 6279 orang jumlah 11446 orang. Kelurahan Maharatu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Sukajadi.
- b. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Tampan.
- c. Sebelah barat berbatas dengan kecamatan tanpan dan Kecamatan Payung Sekaki.
- d. Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Sail.

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Dibawah ini dipaparkan jumlah penduduk yang ada di kelurahan maharatu kecamatan Marpoyan damai yang di jelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.I. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Maharatu

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	5167	50%
2	Perempuan	6279	50%
	Jumlah	11446	100%

Sumber : Kantor Lurah Maharatu 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di kelurahan Maharatu jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih randah dari pada jumlah penduduk jenis kelamin perempuan, yaitu jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 5167 orang sedangkan jenis kelamin perempuan 6279 jiwa.

2. Mata Pencaharian

Masyarakat kelurahan Maharatu beraneka ragam, tetapi yang lebih menonjol adalah belum/ tdak bekerja, mengurus rumah tangga dan pelajar/ mahasiswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2. Jenis dan Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Maharatu

No	Mata Pencaharian	Jumlah penduduk
1	2	3
1	Wirawasta	363
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	355
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	584
7	Kepolisian Ri (POLRI)	47
8	Perdagangan	243
9	Petani/ Perkebunan	315
10	Peternak	319
11	Nelayan/Perikanan	1
12	Kontruksi	8
13	Transportasi	45
14	Karyawan Swasta	430
15	Karyawan BUMN	63
16	Karyawan BUMD	39
17	Karyawan Honoror	77
18	Buruh Harian Lepas	309
19	Pembantu Rumah Tangga	62
20	Tukang Cukur	16
21	Tukang Listrik	29
22	Tukang Batu	95
23	Tukang Kayu	63
25	Tukang Las/ Pandai Besi	14
26	Tukang Jahit	53
27	Tukang Gigi	6
28	Penata Rias	8
29	Penata Rambut	9
30	Mekanik	46
31	Perancang Busanan	1
32	Imam Mesjid	34
33	Wartawan	8
34	Ustads/ Muballigh	21
35	Juru Masak	14
36	Anggota DPR-RI	1

37	Dosen	17
38	Guru	116
39	Pengacara	9
40	Arsitek	10
41	Akuntan	8
42	Konsultan	1
43	Dokter Dan Bidan	25
44	Perawat	29
45	Apoteker	3
46	Penyiar Televisi	2
47	Sopir	175
48	Padagang	330
49	Perangkat Desa	5
Jumlah		4408

Sumber : Kantor Lurah Maharatu 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah mata pencaharian yang lebih dominan di Kelurahan Maharatu adalah TNI yang berjumlah 584 orang dan kemudian disusul Karyawan Swasta yang berjumlah 430 orang.

3. Agama dan Kepercayaan

Sesuai dengan filsafah negara, kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat. Penduduk kelurahan maharatu sebagian besar memeluk Agama Islam, Kristen, Budha Dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel:

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Menurut Penganut Agama Yang Ada Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	10,791
2.	Khatolik	442
3.	Protestan	204
4.	Hindu	7
5.	Budha	2
Jumlah		11446

Sumber : Kantor Lurah Maharatu 2019

Dari tabel IV.3 agama mayoritas yang dianut penduduk kelurahan Maharatu adalah Islam dengan jumlah 10,791 sedangkan agama dengan minoritas terkecil di kelurahan ini adalah Budha dengan jumlah 2 orang.

4. Tingkat pendidikan

Dalam pemerataan pembangunan pendidikan, dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat dan menyikapi kondisi perkembangan informasi yang kian meningkat, masyarakat kelurahan Maharatu memiliki tingkat pendidikan heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisa masyarakat terhadap sistem pemerintahan kecamatan juga yang berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Maharatu yang dituangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Maharatu

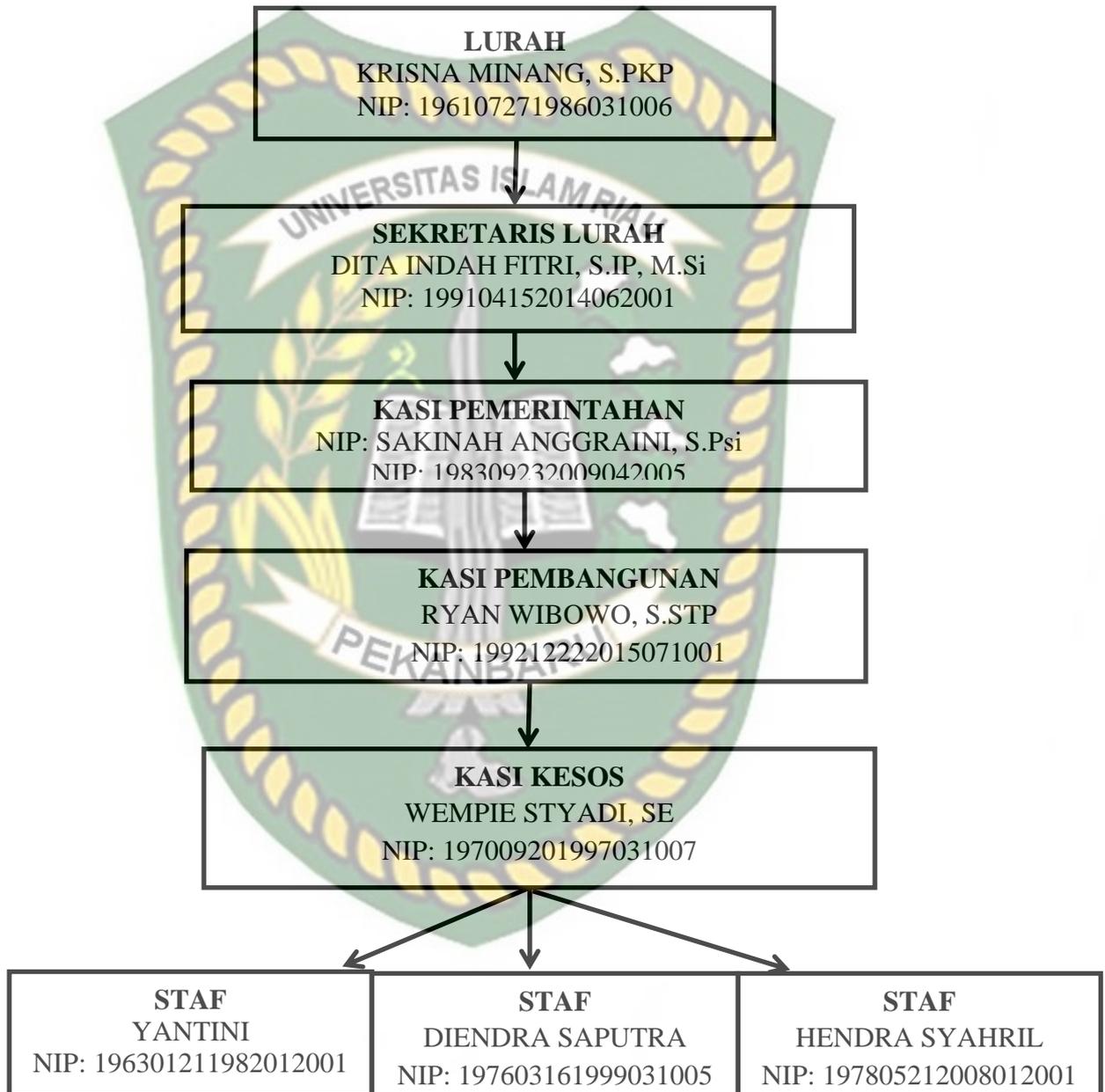
No	Tingkat Pendidikan	Masyarakat
1.	SD	1314
2.	SLTP	1826
3.	SLTA	2722
4.	Akademi (D1-D3)	715
5.	Sarjana (S1-S3)	-
6.	Tidak Sekolah	980
Jumlah		7557

Sumber : Kantor Lurah Maharatu, 2019

Dari tabel IV.4. dilihat dari tabel diatas sebagian besar masyarakat Kelurahan Maharatu adalah tamatan SLTA yang berjumlah 2722 orang.

C. Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan Maharatu

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Kelurahan Maharatu.



Sumber : Kantor Kelurahan Maharatu, 2009

D. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan

Adapun susunan organisasi pemerintahan kelurahan terdiri dari sebagai berikut :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris lurah;
- c. Kasi Pemerintahan;
- d. Kasi Pembangunan;
- e. Kasi Kesos;
- f. Staf;

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan

1. Sekretaris Lurah

Sekretaris lurah mempunyai tugas dibidang kepegawai perencanaan dan keuangan serta melakukan pembinaan adminstrasi dan memberikan adminstrasi

teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud sekretaris mempunyai fungsi.

- a. Menerima petunjuk sesuai dan arahan disposisi atasan;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi program;
- c. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
- d. Mempersiapkan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja, dan budaya tertib;
- e. Penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh lurah;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas;
- h. Pelaksanaan tata umum, kepegaiwaan dan kelengkapan rumah tangga;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kelurahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tuga-tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

2. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala kelurahan di bidang pemerintahan, Kasi pemerintahan fungsi sebagai kepala

kelurahan di bidang pemerintahan, Kasi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- b. Membuat tugas-tugas yang berubungan dengan pemerintahan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dan pengawasan pemilihan umum;
- d. Mempersiapkan ketentuan tentang pengangkatan dan pemeberhentian aparat;
- e. Menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan penduduk, mengikuti, mengumpulkan data pembangunan dan kegiatan kelurahan;
- f. Menyelenggarakan kerjasama antara kelurahan, mengumpulkan data tentang kegiatan pemilihan umum;
- g. Menyusun program dan pembinaan peneyenlenggaraan pemerintahan umum;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrarian
- i. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

3. Kasi Pembangunan

Kasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas kepala kelurahan dibidang pembangunan, Kasi pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
- b. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
- c. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pedoman kerja dan landasan kerja,
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kasi-kasi kelurahan dan lembaga masyarakat di kelurahan,
- e. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan,
- f. Melaksanakan kegiatan swadaya dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan perekonomian ddalam pelaksanaan pembangunan,
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
- h. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasannya,
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kasi Kesos

- a. Menyusun program kerja dan encana kegiatan kesejahteraan masyarakat
- b. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat
- c. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pedoman dan landasan kerja

- d. Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, keluarga berencana, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan PKK, Karang Taruna, Organisasi dan kelermbagaan masyarakat lainnya
- f. Memproses perjanjian nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) sesuai peraturan perundang-undangan
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- h. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasannya
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul evaluasi pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai memberikan gambaran dari responden penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut.

A. Identitas Responden

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka yang menjadi sampel adalah kelurahan maharatu, dari hasil pengamatan penelitian dalam pelaksanaan penelitian terhadap keseluruhan responden yang digunakan sebagai sampel . maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden berguna untuk mengetahui banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat didalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian untuk menjelaskan identitas responden kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di dalam mempengaruhi pekerjaan dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap cara berfikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu penulis menilai perlu memberikan penjelasan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.I. Identitas Responden Tentang Tingkat Pendidikan Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Sekolah dasar (SD)	1	7%
2.	SLTP	3	20%
3.	SLTA	6	40%
4.	SI	4	26%
5.	S2	1	7%

Sumber: Data penelitian lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan responden, berdasarkan data yang berhasil diperoleh penelitian bahwa tingkat pendidikan responden pemerintah kelurahan maharatu yang peneliti jadikan sampel berjumlah 15 orang yaitu lurah, sekretaris lurah, kasi-kasi dan ketua RT/RW.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk menilai pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru

Tabel V.2. Identitas Responden Tentang Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	jumlah	Presentase
1.	Lai-laki	14	93%
2.	Perempuan	1	7%

Berdasarkan Tabel V. 2 di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang atau 97% responden untuk menilai Pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

3. Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Umur

Selain latar belakang pendidikan dan jenis kelamin, umur juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan guna untuk pengumpulan data penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Karena umur merupakan sebuah pengalaman yang dilakukan responden dengan kebutuhan penelitian dan akan mempermudah tingkat pengertian dan pemahaman terhadap pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh penelitian. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat umur responden, maka dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel V.3. Tingkat Responden Dari Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan umur

No	Umur	Responden	Persentase
1	≤ 30 Tahun	2	13%
2	30-39 Tahun	5	33%
3	40-49 Tahun	4	27%
4	≥ 50 Tahun	4	27%
Jumlah			100%

Sumber: Data Penelitian Lapangan 20019

Dilihat dari Tabel V.5 di atas dalam pengelompokan identitas responden dari unsur Pemerintah Kelurahan dan RT/RW pada tingkat umur ialah ≤ 30 tahun yaitu berjumlah 2 orang atau 13% sampai umur dari 50 tahun keatas berjumlah 4 orang atau 27 %.

B. Hasil penelitian

Setelah melakukan penelitian dengan judul pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru maka didapat data responden yang berupa alat pengumpulan data yaitu kuesioner setelah menyebarkan kuesioner, melakukan observasi kelokasi penelitian maka didapatkan hasil penelitian yang akan dijelaskan satu persatu atau perindikator dapat dilihat di bawah ini:

1. Pemeliharaan Rutin

Suatu rencana kerja yang baik tentu diawali dari berbagai program yang akan dijadikan obkjek pembangunan itu sendiri, hal ini diperlukan bila

pembangunan itu untuk masyarakat maka pemerintah itu sebagai acuan bagi penyusunan program. Menyadari pelayanan itu sangat diperlukan dem berlangsungnya proses pelayanan yang optimal maka pemerintah kelurahan harus melakukan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umumnya.

Sehubung dengan proses pemeliharaan rutin berdasarkan temuan di lapangan lurah telah melakukannya, meslipun hasilnya belum memuaskan, kemudian untuk mengetahui jawaban dari pemeliharaan ini maka peneliti melakukan pengumpulan data berupa kuesioner terhadap pemerintah kelurahan, RT, dan RW yang ada di kelurahan maharatu tersebut maka penilaian terhadap jawaban mereka dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel V.4. Tanggapan Responden Perangkat Kelurahan Maharatu Dan RT/RW Mengenai Pemeliharaan Rutin

No	Item Penilaian	Kategori Pilihan			Jumlah
		Berhasil	Cukup berhasil	Kurang berhasil	
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan pengecekan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	8 (54%)	5 (33%)	2 (13%)	15 (100%)
2	Memperbaiki prasarana dan fasilitas pelayanan umum	3 (20%)	7 (47%)	5 (33%)	15 (100%)
3	Melakukan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum	3 (20%)	6 (40%)	6 (40%)	15 (100%)
Jumlah		14	18	13	45
Rata-rata		5	6	4	15
Presentase		(33%)	(40%)	(27%)	(100%)

Sumber: hasil pengelolaan data penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel V.4 pada item penilain yang diberikan melakukan pengecekan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang berada dikelurahan mahartu kecamatan marpoyan damai tingkat kategori berhasil cukup tinggi diatas 50% dengan niali persentase 54%. Hal ini berarti peranan lurah di kelurahan Mahartu kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru dalam melakukan pengecekan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dapat dikatakan berhasil. Sedangkan untuk kategori cukup berhasil persentasenya dengan nilai 33% dan kurang berhasil sebanyak 13%.

Akan tetapi item lainnya dalam pemeliharaan rutin menunjukkan nilai persentase yang sangat rendah dibawah 50% atau dengan nilai 20% yakni pada item memperbaiki prasarana dan fasilitas pelayanan umum, untuk kategori cukup berhasil pada item ini merupakan nilai persentase yang paling tinggi yakni dengan pesentase 47% dan kategori tidak berhasil sebanyak 33%. Sedangkan untuk item penilaian Melakukan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk kategori berhasil sama halnya dengan item memperbaiki prasarana dan fasilitas pelayanan umum yakni dengan pesentase 20 % dan untuk kategori cukup berhasil dan kurang berhasil menunjukkan persentase dengan nilai yang sama yakni 40%.

Secara umum dari tabel diatas tanggapan responden Pada Tabel V.4 di atas dapat dijelaskan bahwa dari tiga penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan berhasil sebanyak 5 atau sama dengan 33% adapun alasan responden melihat bahwasanya lurah dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jauh dari kata berhasil.

Jawaban responden kurang berhasil Kelurahan Maharatu adalah 4 atau sama dengan 27%. Adapun alasan responden tersebut dikarenakan Lurah belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan baik masih dikatakan kategori cukup terlaksana.

Dari Tabel V.4 di atas dapat disimpulkan sesuai teknik yang telah dibuat dengan item pemeliharaan rutin 40% dengan demikian dapat dikatakan pemeliharaan rutin di Kelurahan Maharatu dengan kategori cukup berhasil.

2. Pemeliharaan Berkala

Kelurahan sebagai perangkat kecamatan memiliki program-program yang dimana program-program tersebut harus dilaksanakan sesuai tugas kelurahan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, jadi setiap sarana, prasarana dan fasilitas harus di pelihara dengan baik sesuai aturan yang berlaku, maka perlu dilakukannya pemeliharaan secara berkala.

Sehubungan dengan proses pemeliharaan berkala berdasarkan temuan di lapangan lurah telah melakukannya, meskipun hasilnya hampir sama dengan pemeliharaan rutin belum memuaskan, kemudian untuk mengetahui jawaban dari pemeliharaan ini maka peneliti melakukan pengumpulan data berupa kuesioner terhadap pemerintah kelurahan, RT, dan RW yang ada di kelurahan maharatu tersebut maka penilaian terhadap jawaban mereka dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.5. Tanggapan Responden Perangkat Kelurahan Maharatu Dan RT/RW Mengenai Pemeliharaan Berkala

No	Item Penilaian	Kategori Pilihan			Jumlah
		Berhasil	Cukup berhasil	Kurang berhasil	
1	Membuat jadwal	2	4	9	15

	pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	(13%)	(27%)	(60%)	(100%)
2	Pelaksanaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	2 (13%)	6 (40%)	7 (47%)	15 (100%)
3	Evaluasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	2 (13%)	3 (20%)	10 (67%)	15 (100%)
Jumlah		6	13	26	45
Rerata		2	4	9	15
Presentase		(13%)	(27%)	(60%)	(100%)

Sumber: hasil pengelolaan data penelitian, 2019

Pada Tabel V.5 di atas dapat dijelaskan bahwa dari tiga penilaian yang diberikan, yang pertama membuat jadwal pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kurang berhasil dapat dilihat dari tabel dengan penilaian sebanyak 9 orang dari 15 orang yaitu 60% dari per100%, kemudian dari item penilaian pelaksanaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum mendapatkan kategori kurang berhasil dengan jumlah responden 7 orang dari 15 responden dengan 47% persen hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan di kelurahan dalam melakukan pemeliharaan berkala itu tidak terlaksana dengan baik atau kategori kurang berhasil, sedangkan dari paparan item penilaian evaluasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan kategori kurang berhasil dan presentase 60% .

jawaban responden yang menyatakan berhasil sebanyak 2 atau sama dengan 13% adapun alasan responden melihat bahwasanya lura dalam melaksanakan pemeliharaan berkala jauh dari kata berhasil.

Jawaban responden cukup berhasil Kelurahan Maharatu adalah 4 atau sama dengan 27%. Adapun alasan responden tersebut dikarenakan Lurah belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan baik masi dikatakan kategori cukup berhasil.

Dari Tabel V.5 di atas dapat disimpulkan sesuai teknik yang telah dibuat dengan item pemeliharaan berkala 60% dengan demikian dapat dikatakan pemeliharaan berkala di Kelurahan Maharatu dengan kategori kurang berhasil.

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa lurah tidak menjalankan pemeliharaan berkala dengan kateгоре kurang berhasil.

Hal ini diperkuat dar hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan yaitu Bapak Baharuf Ahmi, ST

Pertayaan :

Apakah ada dari pihak kelurahan maharatu pernah melakukan koordinasi kepada pihak dinas pu terkait perbaikan jalan rusak ?

Jawaban :

“Kelurahan Maharatu pernah melakukan koordinasi dengan Dinas PU tentang adanya jalan rusak, tetapi tidak secara keseluruhan dan beberapa jalan rusak telah kami perbaiki tetapi ada beberapa jalan yang sesuai saudara katakan belum ada sama sekali dari pihak kelurahan melakukan rujukan jalan rusak untuk diperbaiki”

Tabel V.6. Rekapitulasi tanggapan responden tentang pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

No	Indikator	Kategori Pilihan			Jumlah
		Berhasil	Cukup berhasil	Kurang berhasil	
1	Pemeliharaan rutin	5	6	4	15
2	Pemeliharaan berkala	2	4	9	15
Jumlah		7	10	13	20
Rata-rata		3	5	7	15
Presentase		20%	33%	47%	100%

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 2019

Dari tabel rekapitulasi V.6 data dijelaskan mengenai pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan tugas lurah di kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa hasil dari 15 responden presentasi tertinggi 47% atau sama dengan 7 kategori kurang berhasil, kemudian tanggapan 5 responden kategori cukup berhasil dengan presentase 33% dan kategori berhasil ditanggapi oleh 3 responden dengan presentase 20%.

Artinya pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru termaksud dalam kategori kurang berhasil. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Maharatu diperoleh keterangan bahwasanya Lurah dan pemerintah kelurahan telah melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang kurang berhasil.

Dilihat dari data di atas setiap pelaksana indikator mengenai pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan variabel pelaksanaan tugas

Lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang dimana berdasarkan dari dua indikator maka diharapkan kedepannya pemerintah kelurahan meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan RT/RW merupakan mitra dari perangkat kelurahan yang menjadi ujung ombak dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pihak kelurahan dalam melakukan pemeliharaan prasarana seperti jalan yang rusak, drainase, lampu penerangan, tempat sampah dan pelayanan umum lainnya.
2. Tidak adanya dilakukan kerja sama antara pihak yang instansi terkait dalam hal ini koordinasi dengan dinas PU, Kelembagaan RT/RW atau masyarakat sekitar dalam melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diketahui pelaksanaan tugas lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru, maka didapatkan hasil dalam kategori kurang berhasil karena dapat dilihat dari setiap pelaksana indikator mengenai pemeliharaan di wilayah kelurahan maharatu tidak berjalan dengan baik, tetapi ada juga berhasil dengan maksimal seperti pelayanan yang tergolong cukup memuaskan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian adalah :

1. Pemerintah kelurahan maharatu lebih memperhatikan program pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan Maharatu.
2. Perlu diadakannya pendekatan dan melibatkan masyarakat ataupun pihak RT /RW bahkan dengan kelembagaan ataupun instansi yang terkait dengan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan Maharatu.
3. Mengevaluasi program yang belum berhasil dilaksanakan dapat ditinjau kembali dan di perdayakan agar dipergunakan sesuai kebutuhan Kelurahan Maharatu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali. (1996:796). Pengertian Sarana dan Prasarana Olahraga.<http://Delite20.Wordpress.com/2009/11/05/Pengertian-Sarana-Prasarana>. Diakses 21 April 2018.
- Anonym 2018 <Http://Www.Materibelajar.Id/2015/12/Definisi-Implementasi-Dan-Teori.Html>diunduh 21 April 2018 Kota Pekanbaru.
- Anonym.2018.<HTTPS://www.google.Com/search?q=manfaat+fasilitas+umum&clientm> .diunduh 21 April 2018 Kota Pekanbaru.
- Arianto. 2012. Sahabat Bersama.[Online]. Tersedia:<http://kumpulblogger.com> [1]. 21 April 2018 Kota Pekanbaru
- Canning, D. dan Pedroni, P. 2004.The Effect Of Infrastructure On Long Run Economic Growth.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Harsanto, Budi. 2013. Dasar Ilmu Manajemen Operasi. Unpad Press. Sumedang Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hardiyatmo, 2015. Pemeliharaan Jalan Raya. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 524 Hal.
- Jr. Patton, D. Joseph.1995. Preventive Maintenance. The International Society For
- Kansil. 2003. System Pemerintahan Indonesia.Bumi Aksara.Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kodoatie, R. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mankiw, N. Gregory (2003). Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Terjemahan. Measurement And Control. United States.
- Moekijat, 1998.Analisis Jabatan, Bandung : Mandar Maju
- Moenir, 2003, Pendekatan Manusiawi Danorganisasi Terhadappembinaan Kepegawaian,Gunung Agung, Jakarta.
- Ndraha,. 2011, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta. Rineka Cipta.

- Ndraha.(2003). Kybernologi Ilmu Pemerintahan Edisi 1 dan. Jakarta. PT. Rineka Cipta.IBID.
- Nugroho D. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:Gramedia.
- Nurdin, Syaefuddin dan Usman, Basyiruddin, M. 2003.Guru Profesional & Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat Press.
- Pasolong, Harbani. 2008.Teoris Administrasi Publik.Bandung: CV Alfabeta.
- Sehrawat, MS. And JS.Narang, 2001, Production Manajemen, 3rd Edition, Dhonpat Rai & Co. (P) Ltd, Delhi.
- Sunyoto, D. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : CAPS.
- Sutopo Dan Sugianto. 2003. Analisis Kebijakan Public, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Syafiie, Kencana. 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan.Bandung: PT Refika Aditama.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.2002.Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Torang, Syamsir. 2013. Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi. Alfabeta. Bandung. University Press.
- Wasistiono, Sadu. 2001. Kapita Selektas Manajemen Pemerintah Daerah. Sumedang: Alqoprint.
- Wasistiono,Sadu.(2003). *Kapita Selektas Manajemen Pemerintahan Daerah*.Bandung:Fokusmedia
- Westa. (1985). Psikologi PengajaranJakarta: Media Abadi.
- Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi.
- Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Nomor.4 tahun 2016 tentang Pemekaran Kelurahan di kota Pekanbaru

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

